

# LAPORAN

## STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2007



Diterbitkan : Desember 2007

Data : Oktober 2006 – Oktober 2007



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG**

**Kantor Dinas Pertambangan Dan Lingkungan Hidup**

**Kabupaten Sorong**

**Alamat : Jl. Klamono Km. 24**  
**Kabupaten Sorong**

**Telp. : ( 0951 ) 326315**

**Fax : ( 0951 ) 327986**

**E-mail : -**

**Web : -**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkat dan AnugerahNya, Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Sorong Tahun 2007 untuk pertama kali dapat disusun yang bertujuan sebagai suatu sarana penyajian data dan informasi tentang kondisi kependudukan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong serta perubahan-perubahan terhadap lingkungan sebagai dampak aktifitas pembangunan di berbagai sektor.

Kami menyadari bahwa penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) ini belum dapat memenuhi kualitas seperti apa yang diharapkan, hal ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi antara lain :

1. Belum tersedianya Data Base khusus kabupaten Sorong disebabkan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Induk (Kabupaten Sorong) menjadi 1 (satu) Kotamadya dan 2 (dua) Kabupaten.
2. Ketidak lengkapan data yang dimiliki instansi berbagai sektor menyebabkan sulitnya melakukan analisis secara akurat.

Namun demikian dengan segala keterbatasan tersebut, Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) telah berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga dapat menyelesaikan penyusunan buku dimaksud.

Demikian, dan atas bantuan berbagai pihak nara sumber data dan tim penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2007 ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga Tuhan memberkati.

Sekian dan terima kasih.

Sorong, Desember 2007

Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sorong,

Ir. SEPTER KAWAB  
PEMBINA TK.I  
640 020 475

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
BAB I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Tujuan .....	I-2
C. Visi dan Misi Kabupaten Sorong .....	I-2
D. Gambaran Umum .....	I-11
Kondisi Geografis .....	I-11
Kondisi Umum Wilayah .....	I-11
Geologi .....	I-13
Tata Ruang .....	I-14
Kependudukan .....	I-15
Kesehatan .....	I-17
BAB II. Isu Lingkungan Hidup Utama .....	II-1
BAB III. Air .....	III-1
BAB IV. Udara .....	IV-1
BAB V. Lahan dan Hutan .....	V-1
BAB VI. Keaneka Ragaman Hayati .....	VI-1
BAB VII. Pesisir dan Laut .....	VII-1
BAB VIII. Agenda Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	VIII-1

## Daftar Tabel

Table 1.1	: Luas wilayah , jumlah kampung dan kelurahan .....	I-11
Table 1.2	: Produksi minyak gas dan LPG 2006 .....	I-13
Table 1.3	: Distribusi Penduduk Kabupaten Sorong menurut Distrik dan luas wilayah .....	I-16
Table 1.4	: Jumlah Balita yang diimunisasi .....	I-18
Tabel 1.5	: Banyaknya Penduduk Sakit, Hari Sakit dan Rata-rata Lama sakit .....	I-19
Table 1.6	: Jumlah Puskesmas dan Dokter di Kabupaten Sorong .....	I-19
Table 5.1	: Luas Hutan menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan .....	V-1
Table 5.2	: Produksi Hasil Hutan .....	V-1
Table 5.3	: Luas Areal Pengusahaan Hutan menurut Perusahaan .....	V-2
Table 6.1	: Data Keanekaragaman Hayati Flora-Fauna Papua Pada umumnya .....	VI-1
Table 6.2	: Spesies Flora dan Fauna Endemik di Propinsi Papua Barat .....	VI-2

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1	Gambaran penduduk Kabupaten Menurut Kelompok Umur	I-15
2. Gambar 1.2	Jumlah Kasus HIV/AIDS Menurut Jenis Penderita	I-20
3. Gambar 4.1.	Temperatur Udara Bulanan	IV-2
4. Gambar 4.2.	Kelembaban Nisbi Udara	IV-3
5. Gambar 4.3.	Curah Hujan	IV-3

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang dengan subsistem yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Dalam pada itu pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 10 huruf h mewajibkan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah menyediakan informasi Lingkungan Hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat. Selain itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya telah melimpahkan Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah. Dengan meningkatnya Kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup.

Oleh karena itu, Program Pembangunan Lingkungan Hidup seharusnya meliputi Upaya pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup, peningkatan ekonomi kerakyatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pengelolaan tersebut dapat dimasukkan dan dirincikan dalam bentuk kegiatan : Pencegahan, Pencemaran, Penanggulangan kerusakan lingkungan, Pemulihan kualitas lingkungan, Konservasi sumber daya alam dan Pemanfaatannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan data yang benar dan akurat tentang dampak lingkungan untuk menopang pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sorong yang pada akhirnya menciptakan keadaan dimana aspek-aspek keseimbangan antara lingkungan, ekonomi dan sosial dapat berkelanjutan (sustainable), sehingga dapat disajikan dalam Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSHD).

## B. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah sebagai berikut :

1. Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah;
2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup di daerah sebagai bagian dari sistim pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;
3. Sebagai sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahun Daerah (Reptada), Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan Kepentingan Penanaman Modal (Investor);
4. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan tata praja lingkungan (Good Environmental Governmance) di daerah serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

## C. Visi dan Misi Kabupaten Sorong

### 1. Visi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong yang terpilih menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2012, yaitu:

**” TERWUJUDNYA TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN  
SORONG YANG SEJAHTERA”**

Penjelasan visi :

Perwujudan keadaan masyarakat Kabupaten Sorong yang tercukupi kebutuhan kehidupannya dalam tatanan kehidupan yang berkualitas.

Dalam visi ini tatanan kehidupan mengandung arti tatanan masyarakat Kabupaten Sorong yang memiliki peradaban tinggi, santun, menjunjung tinggi norma dan hukum yang berlaku yang dilandasi penguasaan iman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya pengertian sejahtera dalam visi ini adalah tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Sorong baik lahiriah maupun batiniah.

## **2. Misi**

Berdasarkan visi tersebut di atas selanjutnya ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Kabupaten Sorong Tahun 2007-2012, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri
2. Meningkatkan tersedianya infrastruktur dasar yang memadai di ibu kota kabupaten dan ibu kota distrik guna menggerakkan perekonomian dan kawasan serta mengurangi keterisolasian daerah
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat dan peningkatan pendapatan masyarakat
4. Meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan perumahan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu
5. Mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, transparan, responsif, efisien, bertanggung jawab, dan berwibawa
6. Menciptakan kondisi aman, damai, tertib, dan tenteram dalam kehidupan masyarakat

## **Arah Kebijakan**

Untuk mencapai visi dan misi di atas, maka arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan, yaitu :

1. Menciptakan masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri, dan sejahtera dengan membangun keunggulan komperatif dan kompetitif yang didukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas serta kapasitas kelembagan pemerintahan yang terintegrasi

2. Membuka isolasi daerah guna mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan distrik-distrik strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat menjadi motor penggerak bagi daerah-daerah tertinggal di sekitarnya ( hinterland ) dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang strategis serta akselerasi keberpihakan untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal dan terpencil sehingga dapat tumbuh dan berkembang mengejar ketertinggalan pembangunannya
3. Menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk membentuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Sorong dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*) kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) menuju masyarakat yang berkualitas, maju, dan mandiri, dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya
4. Meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan perumahan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan mendorong peranserta berbagai sektor yang memiliki akses terhadap sumber daya produktif terutama sumber permodalan ( *capital resources* ) sehingga dapat menopang akselerasi akses masyarakat terhadap pelayanan kebutuhan dasar
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisien, serta membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terjadi perubahan yang efektif dan efisien pada sistem ketatalaksanaan, tersedianya sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, dan sistem pengawasan yang efektif
6. Meningkatkan penegakan hukum ( *law enforcement* ) dengan menerapkan hukum secara tegas, adil, dan tidak diskriminatif serta meningkatkan peranserta masyarakat untuk mencegah kriminalitas sehingga dapat menciptakan kondisi aman, damai, tertib, dan tenteram di masyarakat.

## **Strategi**

Strategi yang ditempuh untuk membangun Kabupaten Sorong sesuai dengan visi dan misi, yaitu

1. Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimaksudkan untuk pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh melalui peningkatan nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM). Hak-hak dasar rakyat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, dan rasa takut serta kebebasan untuk mengemukakan pikiran dan pendapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan yang kokoh diperlukan bagi pembangunan dan generasi mendatang yang lebih baik
2. Strategi penerobosan isolasi daerah dimaksudkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai daya dukung terhadap pengelolaan sumber daya sesuai dengan potensi yang dimiliki guna meningkatkan produktivitas
3. Strategi peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan hasil produksi daerah dimaksudkan untuk mendorong sektor perekonomian guna meningkatkan akses terhadap pendapatan masyarakat, memperkuat kelembagaan ekonomi baik skala mikro maupun makro dengan pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah yang disertai dengan penguatan institusi baik publik maupun pasar
4. Strategi peningkatan pembangunan kapasitas daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan kemasayarakatan sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparaturnya sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
5. Strategi menciptakan kondisi aman, damai, tertib, dan tenteram dalam kehidupan masyarakat adalah untuk menciptakan kondisi yang dapat dijadikan sebagai dasar sekaligus dapat menjadi inspirasi pemerintah daerah dalam merancang langkah dan kebijakan-kebijakan dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah.

Kondisi kehidupan dengan tatanan dan perangkat kebersamaan sosial, saling menghargai dan menghormati dalam nuansa kebhinekaan, menerima dan menghargai nilai-nilai budaya lokal dengan tidak menafikan pengaruh budaya luar (proses akulturasi budaya), terciptanya rasa aman yang berbasis ketahanan pribadi dan masyarakat

### **Prioritas**

Prioritas pembangunan daerah disusun untuk melaksanakan misi yang telah ditetapkan dan mewujudkan visi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan pengalaman membangun di masa lalu dan berbagai kemungkinan perkembangan / perubahan di masa depan. Prioritas pembangunan Kabupaten Sorong periode 2007-2012, adalah sebagai berikut :

#### **1. Pembangunan SDM**

Prioritas pembangunan SDM di Kabupaten Sorong sangat mendesak untuk dilaksanakan karena kualitas SDM yang dimiliki belum memadai dan belum dapat secara optimal dimanfaatkan dalam pembangunan karena :

- (1) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah Distrik dan Kampung, serta seringnya para pendidik meninggalkan tempat tugas sehingga banyak anak putus sekolah dan kualitas anak didik rendah
- (2) Sarana dan prasarana kesehatan belum memadai terutama di wilayah Distrik dan Kampung, tidak disiplinnya para medis dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta kurangnya obat-obatan yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan dari 10 penyakit utama di wilayah Distrik dan Kampung sehingga derajat kesehatan masyarakat masih rendah
- (3) Kurangnya sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman di wilayah Distrik dan Kampung mengakibatkan rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman, kurangnya sarana air bersih, kurangnya sanitasi, dan banyaknya perumahan penduduk yang tidak layak huni.

- (4) Angkatan kerja yang terus meningkat sedangkan peluang kerja masih terbatas sehingga pengangguran terus meningkat yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat rendah.
- (5) Tingkat pelayanan air bersih di daerah perkotaan dan pedesaan sangat terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan kebutuhan industri yang ada saat ini dan perkembangannya di masa yang akan datang. Oleh sebab itu pengadaan dan pemasangan sarana air bersih di daerah perkotaan dan pedesaan sangat perlu dilakukan guna meningkatkan pelayanan kepada konsumen.

## 2. Pembangunan penerobosan isolasi daerah

Pertimbangan pembangunan penerobosan isolasi daerah dijadikan prioritas pembangunan Kabupaten Sorong pada periode 2007 – 2012, adalah :

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, laut, dan udara masih sangat terbatas terutama di Kota-Kota Distrik. Oleh karena itu, pembangunan transportasi yang perlu mendapat prioritas terutama adalah pembangunan pelabuhan ekspor-impor di kawasan Industri Arar dan pelabuhan perintis di Distrik pesisir untuk dapat melayani arus penumpang dan barang yang terus meningkat jumlahnya serta perlu pula didukung dengan pengadaan sarana dan prasarana transportasi karena belum memadai,
- (2) Infrastruktur ekonomi sebagian kota-kota Distrik dan di pusat-pusat pertumbuhan baru perlu segera dibangun untuk menggerakkan pelaku ekonomi ke kota-kota Distrik dan di pusat-pusat pertumbuhan baru sehingga kota-kota Distrik yang diharapkan dapat tumbuh sebagai pusat distribusi barang dan jasa untuk melayani Kampung-Kampung di sekitarnya dapat terwujud.
- (3) Infrastruktur sebagai pendukung dan penggerak pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah ini perlu segera direalisasikan melalui pembangunan sarana jalan dan jembatan yang menghubungkan Ibu Kota Kabupaten dengan kota Distrik,

antar kota Distrik, dan antar kampung sehingga dapat berfungsi dalam menunjang kelancaran arus barang dan penumpang dari pusat produksi serta meningkatkan hasil produksi dan pendapatan masyarakat, dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Selain itu perlu juga direalisasikan pembangunan jaringan listrik di kota-kota Distrik dan Kampung dengan daya pasang dan daya nyala yang maksimum sehingga dapat berfungsi secara optimal di dalam menggerakkan ekonomi lokal serta pentingnya pembangunan telekomunikasi di kota-kota Distrik dan Kampung yang dapat memudahkan masyarakat, dunia usaha, dan aparat pemerintah untuk berkomunikasi baik dari Kabupaten Sorong maupun ke daerah lain

- (4) Penataan ruang dan lingkungan hidup merupakan hal yang perlu dipertimbangkan di dalam mengatur pemanfaatan ruang di dalam pembangunan, baik pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta, dan masyarakat harus memperhatikan aspek tata ruang dan lingkungan hidup sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak membawa dampak yang negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup. Oleh sebab itu penataan ruang darat dan kelautan perlu dilakukan dan kegiatan Amdal, UKL dan UPL di dalam pembangunan mutlak dilaksanakan.

### 3. Peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat

Pemberdayaan ekonomi rakyat perlu diprioritaskan dalam pembangunan Kabupaten Sorong agar dapat segera mengatasi kesenjangan secara bertahap dan berkesinambungan. Pemberdayaan ekonomi rakyat perlu mengambil langkah proteksi dan advokasi untuk memajukan pelaku ekonomi lokal yang memiliki keterbatasan modal, keterbatasan pengalaman berusaha atau bisnis serta perlu ditingkatkan pembinaan dari instansi teknis sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antar pelaku ekonomi lokal yang tertinggal dengan pelaku non lokal yang cukup maju. Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat perlu ditingkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang merupakan penggerak utama di dalam memacu pembangunan ekonomi,

pemerataan pembangunan, menumbuhkembangkan perekonomian rakyat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menunjang kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah ini.

Selain itu penyediaan lembaga keuangan dan pasar yang memadai perlu disediakan untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah Distrik yang kurang berkembang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorong.

#### 4. Peningkatan pembangunan kapasitas daerah

Kemampuan kapasitas daerah perlu dijadikan prioritas pembangunan agar dapat mengantisipasi dimekarkannya wilayah Kabupaten Sorong menjadi 2 (dua) kabupaten dan Kota, serta dimasa mendatang menjadi 4 (empat) kabupaten dan Kota . Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana fisik pemerintah mutlak disiapkan. Demikian pula kualitas sumber daya aparatur perlu terus ditingkatkan melalui berbagai jenjang pendidikan mulai dari D1 sampai dengan S3, serta melalui pendidikan teknis. Selanjutnya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja bekerja bagi pegawai Pemda Kabupaten Sorong perlu dibangun perumahan pegawai di Kota Aimas yang didukung oleh pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ekonomi dan infrastruktur lainnya agar pegawai dapat bekerja lebih baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dilaksanakannya otonomi khusus, peranan keuangan daerah sangat penting di dalam menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah ini. Oleh sebab itu pengkajian keuangan daerah sangat mutlak dilakukan, untuk mengetahui seberapa besar penerimaan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, perimbangan keuangan dan penerimaan lain-lain untuk menunjang kegiatan pemerinatahan, pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat. Di dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan aparatur yang profesional, jujur dan cekatan, dalam menggali sumber-

sumber pendapatan asli daerah dan di dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan keuangan daerah dapat lebih efektif dan efisien.

Pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah harus lebih ditingkatkan, baik untuk penggunaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Hal ini sangat penting untuk mencegah pengeluaran yang tidak efisien, terkesan boros dan tidak mengena sasaran terhadap pengeluaran rutin dan pembangunan, sehingga keuangan daerah ini dapat benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk jalannya roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan demi kemajuan dan kemakmuran rakyat di daerah ini.

5. Penciptaan kondisi aman, damai, tertib, dan tenteram dalam kehidupan masyarakat

Kondisi aman, damai, tertib, dan tertib perlu diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dalam pembangunan 2007 – 2012 mengingat masih terbatasnya kemampuan aparaturnya di dalam pelaksanaan tugas, baik sebagai penegak hukum maupun di dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat. Oleh sebab itu penegakan hukum ( law enforcement ) dan penciptaan kondisi aman menjadi perhatian utama untuk dilaksanakan.

Selain itu perlu juga dilaksanakan pembinaan politik yang baik terhadap organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi sosial politik agar terbentuk ormas dan organisasi sosial politik yang profesional sehingga kesadaran berbangsa dan bernegara ( rasa patriotisme ) dapat lebih baik dalam alam demokrasi serta dikembangkan pembinaan generasi muda guna mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cinta tanah air dan memiliki visi mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sorong.

## D. GAMBARAN UMUM

### Kondisi Geografis

#### Kondisi Umum Wilayah

Kabupaten Sorong memiliki luas wilayah 17.970 kilometer persegi dengan luas lautan 9.214 kilometer persegi dan luas daratan 8.756 kilometer persegi serta memiliki potensi SDA baik daratan maupun lautan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Sorong.

Kabupaten Sorong terletak diantara 130<sup>0</sup> Bujur Barat dan 132<sup>0</sup>55' Bujur Timur 01<sup>0</sup> Lintang Selatan dan 02<sup>0</sup> Lintang Utara dengan batas administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Barat : Provinsi Maluku dan Maluku Utara
2. Sebelah Timur : Kabupaten Manokwari
3. Sebelah Utara : Samudera Pasifik
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Sorong Selatan

Secara administratif, Kabupaten Sorong dibagi menjadi 16 Distrik, 105 Kampung, dan 5 kelurahan yang secara rinci disajikan pada Tabel 1

**Tabel.1.1**  
**Luas Wilayah, jumlah Kampung, dan Kelurahan**

No	Distrik	Kampung	Kelurahan	Luas ( Km <sup>2</sup> )
1	Sausafor	6	-	2.140,35
2	Moraid	7	-	1.782,00
3	Makbon	8	-	1.670,00
4	Beraur	7	-	1.505,00
5	Salawatri	12	-	663,00
6	Seget	3	-	1.030,00
7	Aimas	6	5	610,00
8	Segun	7	-	640,00
9	Sayosa	7	-	1.149,00
10	Klamono	7	-	2.600,00
11	Peef	6	-	1.890,00
12	Abun	4	-	1.491,00
13	Salawati Selatan	6		500,00
14	Mayamuk	7		303,00
15	Yengbun	5		750,00
16	Miah	6		770,00
Jumlah		105	5	17.970

Sumber : Kabupaten Sorong Dalam Angka 2005

Secara topografi Kabupaten Sorong sangat bervariasi mulai dataran rendah dan berawa. Wilayah Kabupaten Sorong hampir 60 persen berupa daerah pegunungan dengan lereng-lereng yang curam seperti Makbon, Moraid, Sausafor, dan Pulau Salawati terdapat di bagian tengah ke arah timur dan utara. Dua puluh persen topografi Kabupaten Sorong berupa dataran rendah dan sebagian berawa yang menyebar di bagian selatan sampai ke barat.

Ketinggian di Kabupaten Sorong bervariasi yaitu wilayah dengan ketinggian di bawah 100 meter umumnya terdapat di Distrik Seget, Beraur sebagian di Distrik Salawati bagian selatan.

Wilayah dengan ketinggian 500 meter berada di Distrik Aimas sebagian Distrik Salawati, 500 - 2000 meter sebagian besar terdapat di Distrik Sausafor dan ketinggian 2.000 - 2.500 meter terdapat di Distrik Sausafor.

Iklim wilayah Kabupaten Sorong pada umumnya beriklim tropis yang lembab dan panas. Suhu udara rata-rata berkisar antara 25,520 derajat celcius (minimum) dan 30,70 derajat celcius (maksimum) dengan kelembaban udara 84 persen. Curah hujan rata-rata 2.836,4 milimeter per tahun dengan jumlah hari 107-185 turun hujan.

Secara umum berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Sorong mengalir ke arah utara dan ke arah selatan dengan puncak pegunungan berada di Distrik Sausafor. Wilayah yang tergenang pada saat air laut pasang adalah wilayah pantai bagian selatan dan wilayah yang tergenang secara periodik terdapat di distrik Salawati dan Distrik Makbon. Beberapa sungai besar yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayaran dan tempat penangkapan ikan air tawar di Kabupaten Sorong antara lain Werur di Distrik Sausafor, Sungai Warsamson di Distrik Makbon dan Moraid, dan Sungai Klabra yang terdapat di Distrik Beraur.

Karakteristik Tanah di Kabupaten Sorong terdiri dari tekstur halus, sedang, kasar, dan gambut. Mayoritas tanah di wilayah Kabupaten Sorong memiliki tekstur halus. Jenis tanah di kabupaten Sorong terdiri dari Podsolik kelabu, Podsolik Merah Kuning, Organosol, Alluvial, Complex Of Soil, Renzina dan latosol. Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Sorong bervariasi antara kedalaman 0-25 centimeter, 25-50 centimeter, dan 51-100 centimeter.

Kedalaman efektif tanah 0-25 centimeter sebagian kecil tersebar di Distrik Sausafor, dan Moraid.

Tanah dengan kedalaman 25-50 centimeter terdapat di Distrik Sausafor. Kedalaman antara 51-100 centimeter penyebarannya sebagian besar terdapat di Distrik Makbon, Salawati, Sausafor, dan Distrik Beraur, antara 1001-105 centimeter sebagian besar ditemui Distrik Beraur dan Seget, serta tanah dengan kedalaman 150 centimeter pada umumnya terdapat di daerah seperti salawati.

## Geologi

Kabupaten Sorong selain memiliki kekayaan hasil hutan dan perikanan juga menyimpan kekayaan hasil tambang dimana beberapa diantaranya telah eksplorasi seperti minyak yang dilakukan oleh Pertamina di Distrik Klamono dan gas alam yang dilakukan oleh Petrochina. Beberapa potensi tambang dan galian yang masih dapat dikembangkan di Kabupaten Sorong adalah :

- (1) Minyak Bumi dan Gas Alam di Distrik Beraur, Klamono, dan Distrik Seget;
- (2) Emas di Distrik Sausafor, Moraid, dan Distrik Salawati;
- (3) Uranium di Distrik Moraid dan Sausafor;
- (4) Fosfat di Distrik Moraid;
- (5) Kobalt di Distrik Moraid dan Sausafor;
- (6) Tembaga di Distrik Sausafor.

Sampai dengan tahun 2006 hasil eksplorasi dari pertambangan di Kabupaten Sorong adalah minyak bumi dengan produksi sebanyak 3.591.402 BBLS dengan nilai 228.463.245 US\$ , LPG 1.594.884 BBLS nilai 718.667,12 US\$ ,dan Gas dengan produksi 262.809.915 BBLS nilai 473.057,83 (Tabel 1.2).

**Tabel 1.2.**  
**Produksi Minyak Gas Dan LPG 2006**

N O	NAMA PERUSAHAAN	KOMODITI	SATUAN	VOLUME	NILAI (US \$ )
1	JOB PERTAMINA PETROCINA SALAWATI	Minyak bumi	BBLS	1.464.573	93.523.324,38
2	PETROCINA INTERNASIONAL ( BERMUDA )Ltd	Minyak Bumi	BBLS	2.126.829	134.939.921,6 4
3	PETROCINA INTERNASIONAL ( BERMUDA )Ltd	LPG	BBLS	1.594.884	718.667,12
4	PETROCINA INTERNASIONAL ( BERMUDA )Ltd	Gas	BBLS	262.809.915	473.057,83
Jumlah		Minyak Bumi	BBLS	3.591.402	228.463.245
		LPG	BBLS	1.594.844	718.667,12
		Gas	BBLS	262.809.915	473.057,83

Sumber : Dinas Pertambangan & Lingkungan Hidup

## **Tata Ruang**

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong sebagai pedoman perumusan kebijakan pokok penataan ruang memiliki peranan penting dalam pembangunan antara lain untuk :

1. Mengefektifkan keserasian pembangunan lintas sektor, lintas wilayah, serta antarpemerintah, swasta, dan masyarakat agar pembangunan berlangsung secara terpadu dan berkelanjutan baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan
2. Mengarahkan dan memadukan pengembangan infrastruktur sebagai prasyarat berlangsungnya berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat
3. Menetapkan lokasi investasi ( land use ) yang dilaksanakan pemerintah, swasta, dan masyarakat
4. Merumuskan rencana teknik ruang kota yang menjadi dasar untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sorong Tahun 2001 maka ruang lingkup wilayah formal dalam RTRW meliputi 15 Distrik, yaitu Distrik Inanwatan, Distrik Aifat, Distrik Aitinyo, Distrik Ayamaru, Distrik Sausafor, Distrik Moraid, Distrik Teminabuan, Distrik Beraur, Distrik Makbon, Distrik Sorong, Distrik Salawati, Distrik Misol, Distrik Seget, Distrik Waigeo Selatan, dan Distrik Waigeo Utara.

Selanjutnya dengan terjadinya pemekaran Kabupaten menjadi satu kota dan dua kabupaten, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong Selatan, maka RTRW Kabupaten Sorong akan mengalami revisi sesuai dengan ruang lingkup wilayah formal guna kepentingan penataan ruang dalam memenuhi berbagai tuntutan kegiatan pembangunan di berbagai sektor pembangunan serta penyesuaian dengan UU nomor 26 Tahun 2007 yang merevisi UU Nomor 47 Tahun 1997 tentang Penataan Ruang.

Beberapa Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) kecamatan yang telah dibuat adalah (1) RUTRK Inanwatan, Aitinyo, Ayamaru, dan Distrik Teminabuan (masuk wilayah Kabupaten pemekaran Kabupaten Sorong Selatan), (2) RUTRK Distrik Sorong (masuk wilayah Kota Sorong), (3) RUTRK Waigeo Selatan dan RUTRK Kalobo (masuk wilayah Kabupaten Pemekaran Kabupaten Raja Ampat ),

(4) RUTRK Makbon, Aimas, Sausafor, dan RUTRK Salawati yang statusnya berada di wilayah Kabupaten Induk.

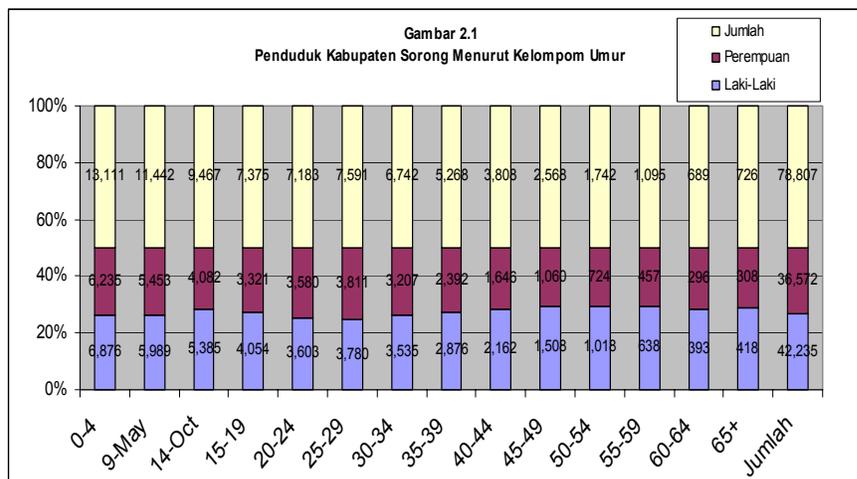
### Kependudukan

Jumlah Penduduk Kabupaten Sorong berjumlah 78.807 Jiwa dengan komposisi 53,59 % (42.235 Jiwa) merupakan penduduk Laki-laki, dan 46,41 % (36.572 Jiwa) adalah penduduk berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian sex ratio penduduk Kabupaten Sorong adalah 115,48.

Penduduk usia produktif (15-64 Tahun) sebanyak 44.061 jiwa (55,91%) dari total penduduk. Apabila dilihat dari jenis kelamin penduduk usia produktif maka ada 23.567 jiwa (53,49%) laki-laki, sedangkan yang perempuan 20.494 jiwa (46,51%).

Sedangkan penduduk yang non produktif (usia 0-14 dan 65+) sekitar 34.746 jiwa atau 44,09% dari total penduduk; terdiri atas 34.020 jiwa (97,91%) merupakan penduduk usia 0-14 tahun dan 726 jiwa (2,09%) merupakan penduduk yang usianya 65 tahun keatas.

Dengan memperhatikan jumlah penduduk usia produktif dan non produktif maka dapat diketahui besarnya angka rasio ketergantungan (Dependency Ratio), yaitu 78,86. Rasio ketergantungan diartikan sebagai besarnya beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau rasio jumlah penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif. Dengan demikian di Kabupaten Sorong pada tahun 2005, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung kurang lebih 79 orang penduduk usia non produktif. Gambaran Penduduk Kabupaten menurut kelompok umur dapat dilihat pada Gambar.1.1



Sumber: BPS Kabupaten Sorong 2005

Sebaran penduduk Kabupaten Sorong yang memiliki luas sekitar 17.970 Km<sup>2</sup> dengan penduduk 78.807 jiwa tersebar pada 105 kampung dan 5 kelurahan yang terhimpun pada 16 distrik, Distrik yang memiliki penduduk paling banyak adalah Distrik Salawati dengan penduduk 26.843 jiwa atau sekitar 34,06 % dari total penduduk, dengan kepadatan 59,19 jiwa / km<sup>2</sup>, Distrik Aimas sebagai pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Sorong mempunyai penduduk 24.695 jiwa atau sekitar 31,34 % dari total penduduk dengan tingkat kepadatan mencapai 40,48 jiwa/km<sup>2</sup>. Dari kedua distrik tersebut dihuni oleh sekitar 51,538 jiwa atau kurang lebih 65,40 % dari total penduduk Kabupaten Sorong pada tahun 2005. Sedangkan kepadatan rata-rata penduduk Kabupaten Sorong sekitar 6,78 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sehingga Distrik Salawati dan Distrik Aimas merupakan tempat konsentrasi penduduk Kabupaten Sorong , sedangkan empat belas distrik lainnya dihuni oleh sekitar 27.269 jiwa atau sekitar 34,60 % dari total penduduk. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Distribusi Penduduk Kabupaten Sorong Menurut Distrik dan Luas Wilayah**

No	Distrik	Luas Wilayah ( Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan ( jiwa/km <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5
1	Sausafor	2.000,35	2.999	2,18
2	Moraid	1.782,0	1.829	1,03
3	Makbon	1.670,00	2.704	2,72
4	Beraur	2.505,00	2.959	3,39
5	Salawati	360,00	25.643	59,19
6	Seget	530,00	5.808	3,30
7	Aimas	610,0	24.695	40,48
8	Segun	640,0	1.956	9,25
9	Sayasa	1.149,00	1.348	1,99
10	Klamono	1.600,00	4.664	7,39
12	Peef	9.10,00	2.329	2,13
12	Abun	1.091,00	561	0,51
13	Salawati Selatan	500,0	1.200	0,63
14	Mayamuk	303,0	531	0,38
15	Yengbun	750,0	571	0,95
16	Miah	770,0	4.750	0,97
Jumlah		<b>11.623,0</b>	<b>78.807</b>	<b>6,78</b>

Sumber : BPS, Sorong Dalam Angka 2005

## **Kesehatan**

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Sorong hanya satu buah dengan kapasitas 167 tempat tidur. Jumlah puskesmas 12 buah pada tahun 2004 telah ditingkatkan menjadi puskesmas Rawat Inap sebanyak 8 buah pada tahun 2005 dan pada akhir 2006 diperkirakan 4 buah Puskesmas non Rawat Inap statusnya sudah menjadi Puskesmas Rawat Inap. Puskesmas pembantu 43 pada tahun 2004 meningkat menjadi 45 dan diperkirakan tahun 2006 meningkat jumlahnya menjadi 48 dari target 105 buah. Puskesmas keliling sampai dengan tahun 2005 tidak mengalami peningkatan jumlah dengan wilayah operasi di Distrik Makbon, Beraur, Seget, dan Distrik Aimas. Keberadaan Pondok Bersalin Desa (Polindes) pada tahun 2005 berjumlah 30 buah dan diperkirakan tahun 2006 meningkat menjadi 40. Pos malaria desa sebanyak 28 tahun 2005 dan diperkirakan tahun 2006 menjadi 40. Untuk jumlah Posyandu berjumlah 95 buah dari target 147 buah dengan penyebaran sebagian besar di Distrik Sausapor, Moraid, Salawati, Aimas, Seget dan Distrik Beraur.

Sampai dengan periode tahun 2005 tenaga medis di Kabupaten Sorong terdiri dari 12 dokter spesialis (bedah, anak penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, mata, Telinga Hidung Tenggorokan (THT), kulit, kelamin serta radiologi). Dokter umum dan dokter gigi sebanyak 31 ( 5 orang bertugas di Puskesmas dari target 12 yang akan ditempatkan pada Puskesmas), tenaga bidan 163 orang ( 130 bidan puskesmas dan 33 bidang rumah sakit), tenaga perawat 510 orang (perawat Puskesmas 297 dan perawat rumah sakit 213), serta tenaga medis non perawatan 14 orang.

Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Sorong mencapai 62 tahun masih dibawah angka nasional (67,9 tahun ), angka kematian ibu per 100.000 berjumlah 282 orang diatas angka nasional (150 orang), angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 66 bayi masih diatas angka nasional (40 bayi), gizi buruk dialami 271 penduduk terjadi penurunan disbanding tahun 2004 sebanyak 1.509 penduduk, dan gizi kurang 75 orang.

Penyakit yang diderita masyarakat Kabupaten Sorong yaitu malaria 156 per 1000 penduduk melebihi angka nasional 5 per 1000 penduduk serta Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Tuberculosis (TBC) paru, diare,

demam berdarah, dan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong berjumlah 217 penderita masih dibawah angka provinsi (2.134 penderita).

Angka kesakitan penyakit utama yaitu malaria klinis menempati dengan presentase 32,33 persen, penyakit lain-lain 16,421 persen, dan malaria 15,353 persen.

Situasi derajat kesehatan di Kabupaten Sorong sebagai gambaran yang menyeluruh tentang pengaruh upaya pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini terlihat pada indikator angka kematian, Imunisasi balita, penduduk sakit, dan rata-rata lama sakit.

Angka kematian bayi di Kabupaten Sorong tahun 2005 adalah sebesar 43 jiwa per 1000 kelahiran ( *BPS, Susenas 2005* ).

Untuk imunisasi balita, belum semua balita mendapat pelayanan imunisasi ( Tabel 1.4 )

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Balita Yang Diimunisasi**

Balita Diimunisasi	2005	
	Target	Realisasi
BCG	1.752	1.358
DPT	1.752	1.296
Campak	1.752	1.168
Polio	1.752	1.382

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong

Jumlah penduduk dan penduduk sakit tahun 2005 (*Susenas 2005*), dari 78.807 penduduk Kabupaten Sorong pada tahun 2005, jumlah penduduk sakit sebanyak 7.913 jiwa. Dengan demikian angka sakit penduduk menurut sakit umum yang diderita 100,4. Hal ini berarti 100,4 jiwa yang menderita sakit diantara 1.000 penduduk. Dengan demikian tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Sorong pada tahun 2005 sebesar 89,96 % dan sekitar 10,04 persen penduduk yang menderita sakit. Sedangkan rata-rata lama sakit yang dialami penduduk akibat penyakit yang diderita dapat dilihat pada tabel 1.5.

**Tabel 1.5**  
**Banyaknya Penduduk Sakit, Hari Sakit dan Rata-Rata Lama Sakit**

Wilayah	Banyaknya		Rata-rata lama sakit ( hari )
	Penduduk Sakit	Hari Sakit	
Kabupaten Sorong	7.913	20.495	2,59

Sumber : Susenas 2005

Dari tabel tersebut diatas , jumlah hari sakit penduduk sebanyak 20.495 hari. Dengan demikian rata-rata lama sakit penduduk yang sakit sebesar 2,59 hari.

Hal ini menunjukkan penduduk yang sakit tersebut mengalami kerugian materiil ( ekonomi ) rata-rata 2,59 hari, karena selama sakit tidak dapat melakukan kegiatan secara normal.

Situasi sumber daya kesehatan di Kabupaten Sorong tercermin melalui persalinan dibantu tenaga medis, Puskesmas, dan Dokter.

Persentase pembantu proses persalinan di Kabupaten Sorong ( Susenas 2005 ) , persalinan ditolong Dokter ( 12,77 % ), Bidan ( 35,63 % ), Tenaga Medis Lainnya ( 3,28 % ), Dukun ( 13,35 % ), Famili ( 31,03 % ), dan lainnya ( 3,94 % ). Sedangkan jumlah Puskesmas dan Dokter di Kabupaten Sorong terdapat pada Tabel 1.6.

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Puskesmas dan Dokter di Kabupaten Sorong**

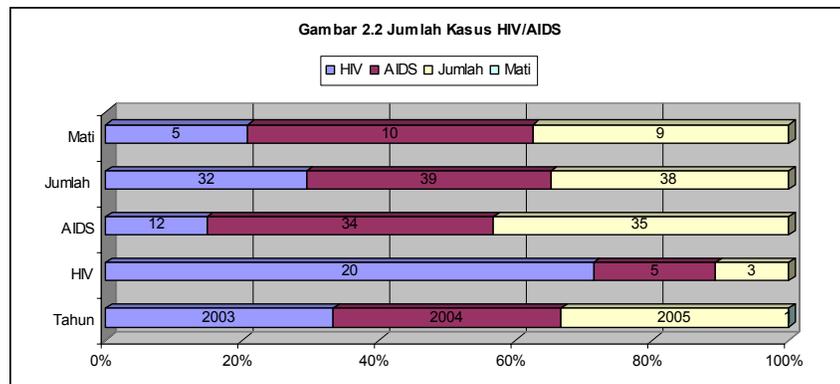
Kondisi Puskesmas dan Dokter	2005
Jumlah Penduduk	78.807
Jumlah Puskesmas/Pustu	58
Jumlah Puskesmas per.10.000 penduduk	7,4
Jumlah Dokter per	10
Jumlah Dokter per 10.000 penduduk	1,3
Jumlah Penduduk Yang dilayani tiap Puskesmas/Pustu	1.359
Jumlah Penduduk Yang dilayani Dokter	7.881

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, diolah

Memperhatikan tabel tersebut ,menunjukkan bahwa rasio Puskesmas/Pustu dan penduduk yang dilayani rata-rata setiap Puskesmas / Pustu melayani kurang lebih 1.359 orang, namun demikian beberapa kendala yang dialami diantaranya kondisi geografis dan konstribusi penduduk yang ada di perkampungan belum adanya sarana pelayanan kesehatan yang memadai. Begitu juga keberadaan Dokter rata-rata 1,3 orang Dokter untuk setiap 10.000 penduduk melayani 7.881 orang.

Hasil pelayanan kontrasepsi keluarga berencana yang merupakan salah satu gambaran sektor kesehatan di Kabupaten Sorong pada tahun 2005 sebanyak 8.354 peserta KB atau sekitar 82,50 persen dari 10.126 pasangan usia subur (PUS) yang terjangkau oleh pelayanan di seluruh distrik. Distrik yang memiliki persentase terbesar peserta KB terhadap PUS adalah Distrik Beraur 87,78 %, Distrik Salawati 79,18 % , dan Distrik Aimas sebesar 71,14 % ( BPS,BPM, diolah ).

Begitu juga masalah HIV /AIDS di Kabupaten Sorong merupakan masalah yang memprihatinkan terutama pada kelompok yang berperilaku resiko tinggi karena transmisi diantara mereka sangat cepat, jumlah kasus HIV/AIDS menurut jenis penderita ( gambar 1.2 ).



Sumber : KPA Kabupaten Sorong

**Kebijakan Pendanaan lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya di daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.**

Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sorong, memang sumber pembiayaan masih dominan dibiayai dan dibantu dari Pemerintah Pusat,

hal ini disebabkan karena pembangunan sarana dan prasarana berbagai sektor pembangunan di Republik Indonesia terutama untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, transportasi, pertanian dan sektor-sektor lainnya masih merupakan tanggung jawab pemerintah termasuk pemerintah daerah tentunya.

Dengan semakin tersedianya infrastruktur dasar maupun sarana dan prasarana dari berbagai sektor, diharapkan dan diupayakan peranan dan partisipasi swasta dan masyarakat dapat lebih diberdayakan dalam partisipasinya terhadap pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Sorong.

Disamping sumber pembiayaan pembangunan dari pemerintah, swasta dan masyarakat akan diupayakan masuknya sumber-sumber dan pembangunan di Kabupaten Sorong dari bantuan luar negeri dalam bentuk bantuan program LOAN dan GRANT, UNICEF, WORLD BANK, ADB, NGO, Investasi dan lain-lain. Untuk membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Sorong selama kurun waktu 2007-2012 maka sumber-sumber dana dapat dijaring melalui :

1. APBD Kabupaten Sorong;
2. APBD Provinsi Papua (Otsus, Dana Bagi Hasil);
3. APBD Provinsi Papua Barat (Dana Bagi Hasil);
4. APBN (DAK DR, DAK Non DR, Dana Perimbangan);
5. Bantuan Luar Negeri (LOAN, GRANT, UNICEF, WORLD BANK, ADB, NGO, JICA dsb);
6. Partisipasi Investor;
7. Partisipasi Swasta;
8. Partisipasi Masyarakat.

Pendanaan lingkungan Kabupaten Sorong pada Tahun 2006 dan 2007 sebagai berikut :

1. Tahun 2006 untuk pengadaan peralatan Laboratorium kualitas air  
DAK = Rp. 310.000.000,-  
APBD II = Rp. 31.000.000,-
2. Tahun 2007 untuk pengadaan sarana dan prasarana Laboratorium  
DAK = Rp. 2.006.000.000,-  
APBD = Rp. 200.600.000,-

## **BAB II**

### **ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA**

Berdasarkan gambaran umum kawasan Ekoregion di Kabupaten Sorong, maka isu-isu strategis pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dikelompokkan ke dalam :

1. Peran serta Masyarakat dan Kearifan lingkungan masyarakat adat.

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Sorong serta kearifan lingkungan masyarakat adat bersumber dari sistem tata nilai dan budaya masyarakat di Kabupaten Sorong. Sistem tata nilai ini telah lama terbentuk secara turun temurun serta merupakan instrumen penting dan sangat efektif dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam dan memproteksi lingkungan. Instrumen tersebut belum dioptimalkan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Sorong.

2. Konservasi dan Preservasi

Kabupaten Sorong saat ini merupakan kawasan yang telah lama dijadikan obyek atau sasaran kegiatan konservasi dan preservasi. Akan tetapi masih banyak kalangan yang mengkonotasikan konservasi hanya dari aspek perlindungan, padahal konservasi sesungguhnya memungkinkan upaya pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Disisi lain berbagai upaya konservasi terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan rehabilitasi kerusakan terhadap sumber daya alam masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi secara fungsional. Sebagai contoh kawasan teluk Berau, dimana telah banyak berbagai pihak melakukan identifikasi maupun implementasi berbagai program konservasi secara terpadu. Selain itu, sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah masih belum menempatkan aspek daya dukung dan kelestarian lingkungan kedalam perencanaan sektoral.

### 3. Kapasitas Kelembagaan

Kinerja Kelembagaan Pemerintah sering terbentur dengan mekanisme koordinasi yang sangat mempengaruhi upaya sinkronisasi dan upaya keterpaduan mulai tahap perencanaan, penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini mengingat di Kabupaten Sorong, baru saja dilakukan pemekaran Kabupaten seperti Sorong Selatan dan Raja Ampat. Meskipun telah terbentuk Lembaga Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Induk sebagai Institusi yang memiliki kapasitas fungsi dan kewenangan untuk mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten, namun dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan tersebut terbentur oleh masih adanya ego instansional. Selain itu, peraturan perundang – undangan sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup maupun aparat penegak hukum dan pengawas lingkungan hidup masih terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas.

### 4. Regulasi dan Penegakan Hukum

Aspek regulasi dan penegakan hukum di Kabupaten Sorong, saat ini masih dalam proses pengembangan dan penataan. Hal ini mengingat terdapat beberapa Kabupaten baru dalam taraf pembenahan regulasi dan aspek penegakan hukum. Terutama regulasi yang berkaitan dengan peraturan daerah maupun Surat Keputusan Bupati yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Aspek kepastian hukum tidak saja meliputi aparat dan perangkat pemerintah saja, akan tetapi sampai menyentuh masyarakat adat pemilik ulayat di Kabupaten Sorong.

### 5. Tata Ruang.

Tata ruang merupakan aspek yang sangat mendasar di Kabupaten Sorong. Tata ruang Kabupaten Sorong merupakan payung perencanaan. Dalam implementasi atau pelaksanaannya perencanaan tersebut belum sepenuhnya mengikuti serta memperhatikan keberlanjutan ekologi secara optimal. Penentuan zonasi belum sinkron dengan daya dukung lingkungan. Kebijakan tata ruang juga belum menyentuh aspek keanekaragaman hayati, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan penataan ruang maupun pengawasannya.

6. Sistem Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Masih terbatasnya data dan informasi mengenai potensi serta usaha – usaha pengelolaan sumber daya alam yang diperlukan dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan, upaya – upaya investasi, dan seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas eksploitasi. Selain terbatas, data dan informasi tersebut tersebar diberbagai organisasi formal maupun non formal serta belum terintegrasi dalam satu sistem manajemen informasi.

## **BAB III**

### **AIR**

Air merupakan sumber daya alam yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Air sangat diperlukan manusia, tidak saja untuk diminum, tapi juga untuk mandi, mencuci dan keperluan lainnya. Kebutuhan akan air tidak hanya dari segi kuantitas tapi juga kualitas. Konsumsi akan air minum mutlak memerlukan air bersih sesuai standar.

Air mandi, cuci atau masakan tidak boleh kotor apalagi tercemar limbah industri karena hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan tubuh terlebih – lebih pada mata dan kulit yang terkena secara langsung. Air kotor yang tergenangpun dapat mengundang daur hidup nyamuk sehingga genangan-genangan tersebut perlu dihindari.

Air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan untuk keperluan Rumah Tangga. Secara fisik air bersih haruslah jernih, tidak berwarna, tawar, tidak berbau, temperatur normal dan tidak mengandung zat padatan secara kimiawi kualitas air baik jika memiliki keasaman (ph) netral serta tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), ion – ion logam dan bahan organik. Sedangkan dari segi biologis, air sebaiknya tidak mengandung bakteri penyebab penyakit (patogen) dan bakteri non patogen.

Jumlah persediaan air bersih / air tawar untuk kabupaten sorong dapat dikatakan masih tersedia dalam jumlah yang besar, namun permasalahannya yang ada dalam hal penyediaan air bersih di Kabupaten Sorong adalah masih terbatas dan kemampuan PDAM Sorong untuk mengelola air sungai menjadi air bersih dikarenakan masih terbatas dan peralatan – peralatan dan teknik – teknik pengelolaan air.

Data curah hujan di Stasiun Meteorologi kelas II Sorong bahwa curah hujan rata – rata tahunan yang tercatat selama tahun 2000 s/d juni 2006 adalah sebanyak 2.640 mm. Periode curah hujan rata – rata bulanan ( > 100 mm ) berlangsung hampir sepanjang tahun, dengan kisaran antara 134 mm pada bulan november sampai 340 mm pada bulan Juni. Sedangkan data hari hujan adalah 185 hari / tahun.

Bila dikalikan luas daratan Kabupaten Sorong 17.970 km<sup>2</sup>, maka jumlah air hujan yang jatuh didaratan kabupaten sorong adalah 48.339.300 jt m<sup>3</sup>. Sebagian besar air tersebut belum dapat dimanfaatkan dan mengalir melalui saluran – saluran air seperti sungai menuju ke laut. Sebagian air hujan akan tertahan di tanah dan danau serta rawa-rawa selanjutnya perlahan-lahan akan mengalir ke laut.

Di Kabupaten Sorong banyak hadir dan berkembang industri-industri baik yang berskala rumah tangga, perkayuan, hingga industri pengolahan minyak. Dalam pengoperasian industri-industri tersebut, di wilayah kerjanya kualitas air berpotensi mengalami penurunan karena adanya buangan limbah cair industri, limbah cair dari aktifitas domestik atau aktifitas terkait lainnya. Air limbah adalah semua jenis air buangan yang mengandung kotoran dari rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan dan dapat termasuk pula buangan industri dan buangan kimia.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa pencemaran air dapat juga terjadi karena proses alam itu sendiri seperti erosi tanah yang mengakibatkan sumber-sumber air dapat tercemar misalnya karena bawaan larian air atau tanah yang masuk ke sungai sehingga air menjadi keruh.

Selain itu pencemaran air dari sumber efluen industri pengolahan di Kabupaten Sorong terjadi dari kegiatan-kegiatan usaha Industri Kayu lapis, Industri Kilang Minyak, Pengeboran Minyak Mentah (seperti terlihat pada lampiran tabel), Agro Industri dari usaha ternak sapi, babi, ayam, kambing, itik dan ayam petelur. Selanjutnya dari pengolahan makanan meliputi kegiatan rumah potong hewan, pengolahan biji-bijian, es batu, tempe dan minuman ringan.

Pencemaran air dari sumber domestik, didasarkan atas jumlah penduduk dengan kriteria yang mempunyai saluran dan tempat pembuangan saluran limbah cair. Kegiatan domestik dimaksudkan yang mencakup kegiatan limbah cair rumah tangga (sisa dapur, cucian, mandi dan lainy-lainnya) dan kegiatan hotel serta restoran.

Khusus kegiatan restoran dan rumah makan di Kabupaten Sorong pada umumnya belum dilengkapi dengan pengolahan limbah cair.

Tidak kalah pentingnya kegiatan pusat perdagangan / pasar yang banyak menghasilkan limbah cair tanpa ada instalasi pengolahan limbah cair sehingga dapat mencemari air permukaan sungai.

Selanjutnya pencemaran Air dan Sumber Efluen Industri Pengolahan yang menghasilkan limbah dan dapat mencemari air permukaan dalam bentuk peningkatan BOD<sub>5</sub>, COD, Konsentrasi S, TDS, N dapat diperhitungkan dengan memanfaatkan koefisien berdasarkan Buku Petunjuk. Namun dengan adanya sistem pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang baik, maka kualitas air setempat dapat dipertahankan sehingga potensi terjadinya pencemaran dapat dikurangi.

## BAB IV

### UDARA

Udara adalah gas – gas yang tak terlihat, yang membentuk atmosfer bumi. Atmosfer merupakan lapisan yang sangat tipis dan terutama tersusun atas gas Nitrogen (78 %) dan Oksigen (21%). Gas – gas lain penyusun atmosfer adalah trace gases serta partikulat, termasuk uap air, ozon, karbon dioksida, argon, neon, helium, hidrogen, dan lainnya. Kondisi udara tersebut pada umumnya berpotensi mengalami pencemaran oleh karena suatu sebab tertentu. Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan – bahan atau zat – zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Keberadaan bahan (zat asing) di udara dalam jumlah tertentu serta dalam waktu tertentu yang cukup lama dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan.

Semua makhluk hidup termasuk manusia memerlukan udara yang bersih agar dapat hidup sehat. Menghirup udara yang tercemar dapat mengakibatkan keracunan tubuh sehingga dapat mengganggu mekanisme kerja berbagai organ tubuh bahkan dapat berakibat pada kematian.

Kualitas udara di suatu tempat dipengaruhi oleh :

1. Iklim dan meteorologi
2. Emisi Udara
3. Udara Ambien
4. Kebisingan

#### 1. Iklim dan meteorologi

Iklim dan meteorologi sebenarnya memiliki pengaruh terhadap kualitas udara di suatu tempat. Iklim dan meteorologi saling mempengaruhi dan dipengaruhi dalam menentukan kualitas udara setempat. Dengan demikian, pemantauan terhadap iklim dan kondisi meteorologi setempat memiliki arti penting dalam penentuan kualitas udara setempat. Informasi tentang iklim dan meteorologi setempat diperoleh ( dikumpulkan ) dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi ( BMG ) di kelas II Sorong.

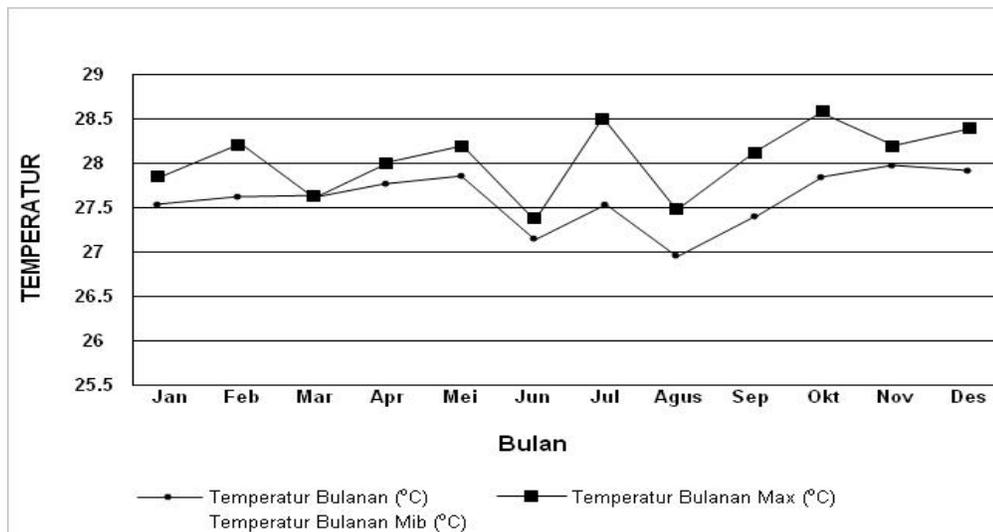
Hasil analisis data sekunder dari BMG kelas II Sorong tentang kondisi Meteorologi setempat pada periode tahun 2002 - ( Juni ) 2006 menunjukkan perbandingan antara bulan kering terhadap bulan basah berada dalam selang 0 – 0,143.

Dengan demikian, sesuai klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Fergusson, Sorong dan wilayah sekitarnya termasuk tipe iklim A, yaitu sangat basah. Bulan kering adalah bulan dengan curah hujan < 60 mm, sedangkan bulan basah bercurah hujan > 60 mm.

### 1.1. Temperatur udara

Keadaan temperatur udara rata-rata bulanan selama tahun 2002 - juni 2006 yang terpantau dari Stasiun Meteorologi kelas II Sorong pada ketinggian 3 meter diatas permukaan laut.

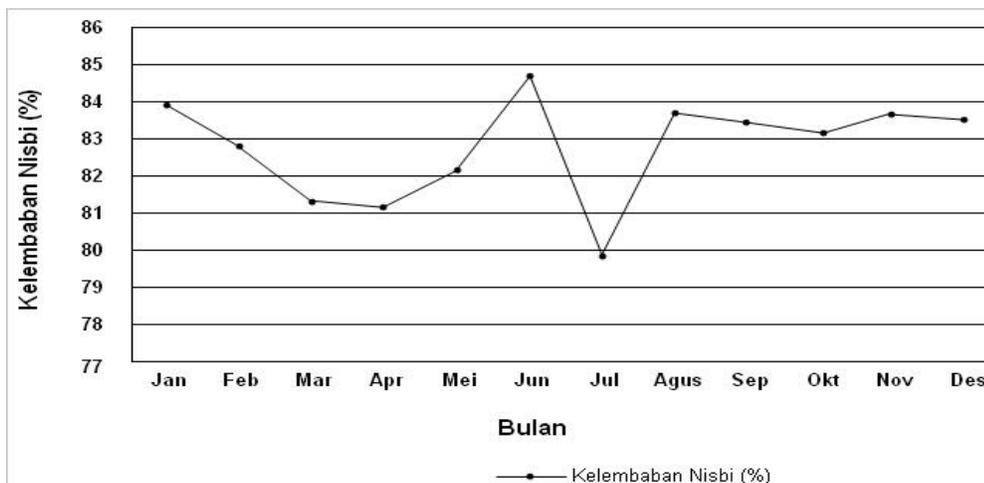
Perubahan temperatur secara umum tidak begitu bervariasi setiap bulannya. Temperatur udara rata – rata bulanan tertinggi terjadi pada bulan Nopember yaitu 28.0° C, sedangkan yang terendah pada bulan agustus yaitu 26.9° C. Temperatur maksimum berkisar antara 28.8 – 27.3°C, sedangkan temperatur minimum berkisar antara 27.8 – 26.5° C. Gambar 4.1. menampilkan grafik temperatur udara bulanan selama tahun 2002 sampai juni 2006 Stasiun Sorong.



### 1.2. Kelembaban Udara

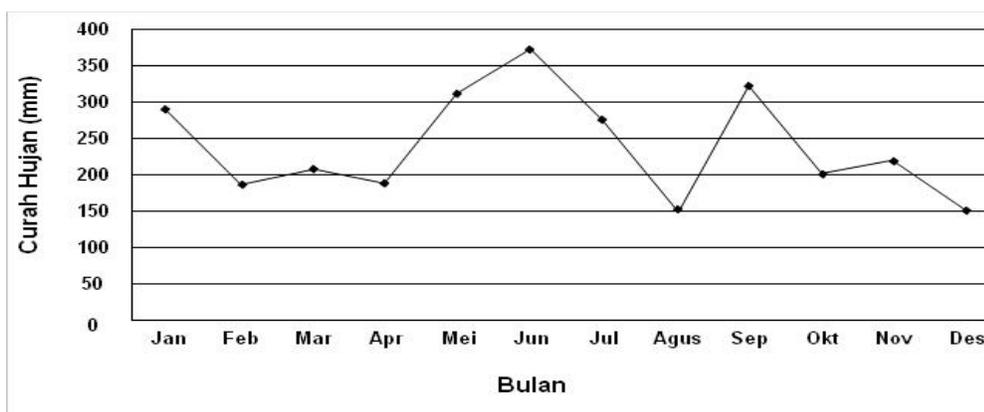
Rata – rata kelembaban udara nisbi bulanan selama tahun 2002 – juni 2006 yang terpantau dari Stasiun Meteorologi kelas II Sorong pada ketinggian 3 meter diatas permukaan laut berkisar terendah 79.8% terjadi pada bulan juli dan tertinggi 84.8% pada bulan juni.

Gambar 4.2 menampilkan keadaan kelembaban nisbi udara rata – rata bulanan selama tahun 2002 – juni 2006 di Stasiun Sorong.



### 1.3. Curah hujan

Data curah hujan di Stasiun Meteorologi kelas II Sorong bahwa curah hujan rata – rata tahunan yang tercatat selama tahun 2002 – juni 2006 adalah sebanyak 2.690 mm. Periode tinggi curah hujan rata – rata bulanan (> 100 mm) berlangsung hampir sepanjang tahun, dengan kisaran antara 134 mm pada bulan Nopember sampai 390 mm pada bulan juni. Periode rendah curah hujan rata – rata bulanan (< 60 mm) tidak terjadi di daerah pantau. Gambar 4.3 menampilkan grafik curah hujan rata – rata bulanan Stasiun Meteorologi Sorong tahun 2002 – Juni 2006.



#### 1.4. Hari Hujan

Data hari hujan di Stasiun Meteorologi Sorong menunjukkan bahwa jumlah hari hujan rata – rata tahunan selama tahun 2002 – juni 2006 adalah 185 hari.

Periode hari hujan paling banyak jatuh bulan April dan Juni sebanyak 21 hari, sedangkan hari hujan paling sedikit terjadi bulan Agustus sebanyak 12 hari.

#### 1.5. Arah dan kecepatan angin

Data arah kecepatan angin yang terpantau dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika kelas II Sorong selama tahun 2002 – Juni 2006 menunjukkan pola bahwa arah angin dominan cenderung bertiup dari arah Utara dan Timur Laut pada bulan Januari sampai dengan bulan April, dengan kecepatan rata – rata berkisar antara 10 – 15 knot. Pada bulan Mei sampai dengan Oktober arah angin dominan cenderung dari arah Selatan dan Tenggara, dengan kecepatan rata – rata berkisar antara 10 – 16,5 knot. Kecepatan angin rata – rata bulanan tertinggi jatuh pada bulan Agustus dengan kecepatan 17 knot.

### 2. Emisi Udara

Terdapat dua bentuk emisi dari unsur dan / atau senyawa pencemar udara. Bentuk emisi udara tersebut adalah

#### a. Emisi Primer (Primary air Pollutant)

Emisi primer merupakan emisi unsur pencemar udara yang langsung ke atmosfer dan berasal dari sumber-sumber diam maupun bergerak. Emisi udara primer ini mempunyai paruh waktu yang tinggi. Misalnya gas CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CFC, CL<sub>2</sub>, Partikel debu dan lain-lain.

#### b. Emisi Sekunder (Secondary air Pollutant)

Emisi sekunder adalah emisi pencemaran udara akibat proses fisikokimia yang terjadi secara alami di atmosfer. Proses tersebut dalam bentuk fitokimia yang umumnya bersifat reaktif dan mengalami transformasi fisika kimia menjadi unsur – unsur atau senyawa tertentu.

### 3. Kualitas Udara Ambien

Kualitas udara menunjukkan keadaan udara yang ada disuatu daerah tertentu pada saat tertentu. Kualitas udara dinyatakan dalam suatu bilangan atau angka yang menunjukkan konsentrasi atau kadar polutan udara.

Kualitas udara tergolong baik jika konsentrasi polutan sangat kecil atau berkisar pada konsentrasi latar (background) . Kualitas udara tergolong buruk apabila konsentrasi ambient yang terukur memiliki pengaruh yang berarti bagi kesehatan manusia, flora dan fauna serta material ( dinyatakan sebagai baku mutu udara ambient ).

### 4. Kebisingan

Kebisingan dapat diartikan sebagai bentuk suara yang idak diinginkan atau bentuk suara yang tidak sesuai dengan tempat dan waktunya suara tersebut diinginkan karena mengganggu pembicaraan dan telinga manusia serta dapat merusak pendengaran dan kenyamanan manusia termasuk lingkungan seperti flora, fauna dan sistem lainnya dialam.

Penurunan kualitas udara atau pencemaran udara pada umumnya sebagai akibat dari kegiatan manusia yang berasal dari sumber bergerak dan tidak bergerak. Selain itu, berbagai reaksi atmosferik seperti penyebaran (dispersi), pengenceran (dilusi), perubahan (transformasi) dan pencampuran (mixing) juga dapat mempengaruhi kualitas alam setempat.

Pencemaran udara dapat terjadi oleh proses alam seperti kegiatan gunung berapi yang melepaskan berbagai gas ke udara ( SO<sub>2</sub>, NO, CO, CO<sub>2</sub> ), debu dan aktifitas kendaraan bermotor yang ada. Umumnya kondisi kendaraan bermotor di Sorong cepat mengalami kesusutan pada kondisi mesin diakibatkan oleh berbagai faktor seperti :

- Banyak sekali Bahan Bakar Minyak yang dicampur secara ilegal untuk dijual kepada umum sehingga sangat berpengaruh terhadap pembakaran.
- Kadar bensin yang dibawah Nilai Konstan apabila digunakan pada kendaraan bermotor, maka asapnya / gas buangnya akan mengandung gas beracun (HC/CO) yang tersebar ke udara karena pembakarannya tidak maksimal / tidak normal.

- Banyak juga penyaringan minyak pelumas bekas yang dijual kepada umum untuk digunakan pada kendaraan dimana viskositas / titik kekentalannya sudah kadaluarsa sehingga menyebabkan silinder mesin cepat aus dan dapat menimbulkan asap beracun / polusi udara.
- Kondisi jalan yang rusak dan sering dilalui setiap kendaraan berpengaruh terhadap kerja mesin karena mesin membutuhkan momen lebih untuk menarik beban.
- Rata – rata kendaraan bermotor angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Sorong adalah kendaraan tua yang tentunya gas buangnya dapat melebihi ambang batas di lingkungan.

Selain itu berbagai kegiatan manusia juga merupakan penyebab utama meningkatnya beban pencemaran udara dewasa ini, misalnya yang dihasilkan oleh kegiatan – kegiatan industri yang ada di Kabupaten Sorong.

Namun demikian sumber pencemaran dari industri pengolahan di Kabupaten Sorong, dapat dijelaskan antara lain, industri pabrik kayu lapis, industri kilang minyak, pengeboran minyak, galangan kapal/dok dan industri pengolahan ikan. Semua kegiatan usaha tersebut berada di luar daerah perkotaan dan pemukiman sehingga dampak pencemaran yang ditimbulkan belum dirasakan.

**BAB V**  
**LAHAN DAN HUTAN**

Luas hutan menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di Kabupaten Sorong mencapai 2.266.250 hektar yang terdiri dari hutan lindung 591.991 hektar, hutan PPA 632.099 hektar, hutan produksi terbatas 279.021 hektar, hutan produksi tetap 422.737 hektar, hutan produksi 319.118 hektar, dan hutan penggunaan lain - lain 21.284 hektar (Tabel 5.1).

Produksi hasil hutan di Kabupaten Sorong pada tahun 2003 - 2005 rata-rata mengalami penurunan 102,65 persen. Produksi tersebut dihasilkan dari kayu log, kayu gergajian plywood, dan blokboard (Tabel 5.2).

Luas areal penguasaan hutan menurut perusahaan di Kabupaten Sorong terdiri dari PT. Intim Pura Timber CO, PT. Hasrat Wira Mandiri, PT. Multi Wahana Wijaya, dan PT Mancaraya Sargo Mandiri dengan luas lahan 691.450 hektar (Tabel 5.3).

**Tabel 5.1 Luas Hutan menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan**

NO	TATA GUNA HUTAN	2003	2004	2005
1	Hutan Lindung	591.991	591.991	304.209,36
2	Hutan PPA	632.099	632.099	24.262,12
3	Hutan Produksi Terbatas	279.021	279.021	206.174,24
4	Hutan Produksi Tetap	422.737	422.737	165.092,15
5	Hutan Produksi dikonversikan	319.118	319.118	487.328,29
6	Hutan Penggunaan lain-lain	21.284	21.284	16.584,21
Jumlah		2.266.250	2.266.250	1.203.652,37

Sumber : BPS Dalam Angka

**Tabel 5.2 Produksi Hasil Hutan ( M<sup>3</sup> )**

NO	TATA GUNA HUTAN	2003	2004	2005
1	Kayo Log	102.328,38	85.171,85	27.110,68
2	Kayu Gergajian	5.104,705	4.556,78	2.577,34
3	Polywood	42.874,24	32.552,16	36.190,62
4	Blokboard	3.690,300	2.993,57	1.830,32
5	Minyak Lawang	-		-
6	Rotan	-		-
7	Kayu Bakau	-		-
8	Kopal	-		-
Jumlah		153.997,625	125.274,36	67,708,96

Sumber : BPS Dalam Angka

**Tabel 5.3. Luas Areal Pengusahaan Hutan Menurut Perusahaan**

<b>NO</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	<b>LUAS (Ha)</b>	<b>Lokasi</b>
1	PT. INTIM PURA TIMBER CO	333.000	Distrik Aimas, Makbon, Beraur
2	PT. HASRAT WIRA MANDIRI	119.700	Distrik Seget, Beraur
3	PT. MULTI WAHANA WIJAYA	139.000	Distrik Sausafor
4	PT. MANCARAYA AGRO MANDIRI	99.750	Distrik Moraid

*Sumber : BPS Dalam Angka 2004*

Kawasan hutan Kabupaten Sorong potensial untuk dikembangkan terutama dalam pengolahan hasil hutan. Penetapan Kabupaten Sorong sebagai sebagai salah satu zona pembangunan industri dalam pemetaan di lingkup Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat memperkuat bahwa sub sektor kehutanan memiliki prospek untuk dikembangkan. Tujuan utama dibentuknya zona-zona industri adalah untuk mengembangkan bisnis kehutanan yang mengintegrasikan kegiatan loging, reboisasi, pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu), pemasaran, dan pelibatan komunitas lokal.

Profil dari industri pengolahan kayu dan / atau industri lainnya yang terkait dengan sub sektor kehutanan di Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut : (1) Lokasi distrik Salawati, (2) Rata-rata luas lahan kawasan hutan terdiri hutan produksi terbatas 168.560 hektar, hutan produksi tetap 545.560 hektar, dan hutan yang dapat dikonversi 1.144.161 hektar, (3) Aksesibilitas wilayah berupa jalan darat, (4) Pasar domestik dan luar negeri

Hutan merupakan SDA yang sangat penting bagi makhluk hidup termasuk manusia yang ada didalamnya dengan fungsi sebagai pengatur tata air, pencegah erosi, dan banjir serta berbagai fungsi lainnya. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan pembangunan di Kabupaten Sorong baik manfaat ekologi, sosial. Oleh sebab itu hutan harus dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat (*forest for people*) baik sekarang maupun untuk generasi yang akan datang.

Permasalahan yang seringkali dihadapi dalam kegiatan pengelolaan hutan adalah tidak dilibatkannya masyarakat sehingga menimbulkan kesan bahwa SDA yang berlimpah tidak dapat memakmurkan masyarakat.

Selanjutnya kegagalan pemenuhan hak dasar memburuknya kondisi lingkungan hidup dan SDA, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap SDA menimbulkan permasalahan, antara lain :

1. Masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar hutan belum diberdayakan
2. Kurangnya sosialisasi tentang fungsi hutan tanah dan air
3. Belum adanya peraturan tentang perlindungan masyarakat adat atau ulayat setempat serta jaminan atas hak-hak ulayatnya

Sasaran penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat adat/ulayat adalah mengurangnya kemiskinan dan menambahnya penghasilan bagi masyarakat adat ulayat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Secara rinci sasaran tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta terjamin dan terlindungnya hak-hak masyarakat adat atau ulayat.

Untuk merespon permasalahan pokok dan sasaran di atas, maka arah kebijakan yang diperlukan adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang dilakukan dengan :

1. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan
2. Menciptakan peraturan perlindungan hak-hak masyarakat adat (ulayat) terhadap kompensasi kepemilikan atas hak-hak adat (ulayat)

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka pengelolaan hutan haruslah melibatkan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada hasil dan kurang memperhatikan hak dan keterlibatan masyarakat perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Program dan kegiatan dalam upaya pemanfaatan sumber daya hutan adalah:

1. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan dengan kegiatan, yaitu :
  - (1) Meningkatkan peranserta aktif masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dengan memperhatikan asas kelestarian

- (2) Melakukan pembinaan masyarakat dan pengusaha di bidang kehutanan
  - (3) Mengembangkan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat dengan sistem *agroforestry*.
2. Program perlindungan dan konservasi SDA dengan kegiatan antara lain, yaitu:
- (1) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan
  - (2) Meningkatkan melakukan penataan batas kembali daerah konservasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi daerah
  - (3) Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat dan instansi teknis terkait tentang fungsi hutan, tanah dan air

-

## BAB VI

### KEANEKA RAGAMAN HAYATI

Kabupaten Sorong dikaruniai dengan sumber daya alam yang sangat kaya, termasuk keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan variasi kehidupan dalam seluruh spesies dan ekosistemnya. Kekayaan sumber hayati tersebut dapat dielompokkan dalam 2 (dua) tingkat yaitu jumlah spesies dan ekosistemnya. Kekayaan flora dan fauna Papua membuat Indonesia menempati peringkat keatas dalam hal keanekaragaman hayati. Saat ini keanekaragaman hayati yang telah dilakukan dan dideskripsikan oleh para ahli hanya sekitar 1,8 juta Sp, sedangkan sisanya yang belum terdeskripsikan diperkirakan sekitar 3 sampai 30 juta Sp (Muller, 2005) jenis yang masih hidup saat ini mewakili kurang dari 1 % jumlah total Sp yang terdapat pada planet ini sejak adanya kehidupan di bumi (Town send, 2000).

Table 6.1. Beberapa data keanekaragaman hayati flora-fauna Papua pada umumnya (Muller, 2005; Dransfield dan Baker, 2006; Beehler 1986; Oshea, 1996; de Vogel dan Schuiteman. 2002; Allen, 1991; Allen, dan Swaintson, 1993; Petocz, 1983)

No.	Jenis/spesies flora dan fauna	Jumlah spesies yang telah diidentifikasi	Perkiraan jumlah total jenisnya di Papua	Keterangan
1	Tumbuhan berbunga	1350	270.000	
2	Tumbuhan vascular	3000 (1500 genera)	25.000 lebih	90 % endemik
3	Palem	270 (31 genera)		2.300 jenis di dunia
4	Anggrek (Orhid)	560 (29 genera)	3.000 (130 genera)	
5	Fungi (Jmur)	2.390	15.000 - 90.000	
6	Burung (Aves)	652 ( 79 genera)	725 – 762	
7	Amphibi dan Reptil	329	700	510 endemik
8	Ular	93 (13 famili)	100 spesies	Terbanyak
9	Serangga (Plethora)		150.000	204 endemik
10	Ikan air tawar	329		16.000 di dunia
11	Ikan karang (laut)	678	2000 lebih	92 endemik
12	Mamalia	153		

Keanekaragaman tumbuhan dan keendemikannya merupakan tanggapan terhadap tipe tanah, iklim khususnya curah hujan, musim serta temperature) dan migrasi dari daerah lain.

Tabel 6.2 Beberapa spesies flora dan fauna endemik di Provinsi Papua Barat

No.	Nama Lokal	Nama Latin	Terdapat di
1	Rumput kebar	<i>Byopitum ptersianum</i>	Lembah kembar
2	Palem ekor ikan	<i>Sommieria leucohylla</i>	Manokwari, Teminabuan, Timika
3	Rotan bulu babi	<i>Daemonorops komsariana</i>	Teminabuan
4	Palem ombrus supiori	<i>Hydriastela dransfieldy</i>	Biak, Supiori
5	Pelem akar gantung	<i>Drymophleous oliviformis</i>	Manokwari, wandamen
6	Calamus maturbongsii	<i>Calamus maturbongsii</i>	Sorong, PNG
7	Calamus wanggaii	<i>Calamus wanggaii</i>	Wandamen
8	Kupu-kupu sayap burung	<i>Ornithoptera priamus</i>	Peg. arfak, peg. Wondiwoi
9	Burung pintar/fogelkop-bowerbid	<i>Amblyornis inornatus</i>	Peg. Arfak, Peg. Tamrauw, Peg. Wondiwoi
10	Ikan pelangi waigeo/waigeo rainbowfish	<i>Melanotaenia chaterinae</i>	Pulau Waigeo
11	Irian Jaya rainbowfish	<i>Melanotaenia irianjaya</i>	Semenanjung bomberai
12	Misol rainbowfish	<i>Melanotaenisis missolensis</i>	Sungai Tama, Fakal, (P. Misol)

Di Kabupaten Sorong, ekosisten hutan memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, sehingga berperan penting dalam menopang kehidupan yang ada. Hutan memberikan perlindungan terhadap kestabilan tanah, iklim local, hidrologi tanah dan efisiensi siklus hara diantara tanah dan avegetasi. Hutan juga dapat menyerap kabodioksida (CO<sub>2</sub>) yang di atmosfer sehingga mengurangi pemanasan global.

Hutan juga menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna seperti : Burung Cenderawasih, Kasuari, Mambruk, beberapa jenis anggrek dan lain-lainnya termasuk yang dilindungi. Dilihat dari segi ekonomi, hutan tidak saja menghasilkan kayu industri dan kayu bakar, melainkan juga obat-obatan dan tanaman bermanfaat lainnya.

Perubahan fungsi hutan yang sekarang terjadi di Kabupaten Sorong antara lain :

1. Hutan dijadikan sebagai areal perkebunan
2. Hutan dijadikan sebagai areal pertambangan
3. Hutan dijadikan sebagai areal perindustrian

Disamping itu penebangan hutan secara liar dan perladangan yang berpindah-pindah dan tak terkendali didalam hutan dapat menyebabkan kerusakan hutan akibat belum optimalnya kegiatan reboisasi.

Menurut konvensi Ramsar, lahan basah adalah kawasan payau, fen, tanah berlumpur atau genangan, alami maupun buatan, air tenang maupun pasang surut, bergaram maupun tawar, termasuk daerah laut bergelombang rendah dengan kedalaman tak lebih dari 6 m. daerah terumbu karang, area rumput laut di daerah pantai, mangrove, kawasan payau, rawa air tawar, hutan rawa, sungai dan danau termasuk lahan basah. Ekosistem yang sangat produktif dan memiliki banyak keuntungan. Lahan basah penting karena merupakan habitat keanekaragaman hayati. Secara ekologis ia menjadi daerah resapan sekaligus pemasok air tanah menahan intrusi air laut, menahan arus dan tempat persemaian ikan. Lahan basah merupakan daerah hunian ikan dan aneka biota air, kayu mangrove dan lainnya yang penting secara ekonomi.

Keanekaragaman hayati ini cenderung menurun akibat perubahan penggunaan lahan dari hutan ke penggunaan lain. Seperti bertambahnya lahan untuk pertanian/perkebunan, pemukiman serta kegiatan logging/eksploitasi hasil hutan dan Pertambangan. Sementara itu perburuan terus menerus terhadap jenis-jenis fauna yang dilindungi untuk diperdagangkan masih terus berlangsung. Menurunnya keanekaragaman hayati juga terjadi didaerah pesisir pantai dan lautan. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (pemboman) dan bahan beracun masih sering terjadi. Penangkapan terhadap jenis-jenis biota laut yang dilindungi seperti penyu.

Demikian juga laju pertumbuhan penduduk serta  $\square$ pecime dari luar Kabupaten Sorong, pemekaran kabupaten dan kota yang disertai dengan pembangunan infrastrukturnya dapat merupakan ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Untuk itu diharapkan perlu adanya kebijakan pengelolaan lingkungan sehingga keanekaragaman hayati dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan beberapa hal seperti dibawah ini yaitu :

- Kajian biofisik (Amdal).
- Pemetaan spesies-spesies flora dan fauna endemic pada setiap ekosistemnya.
- Kajian status populasi flora dan fauna  $\square$ pecime dengan berdasar pada kemampuan pengembangbiakan serta pola sebarannya.
- Kalau mau melindungi keanekaragaman hayati maka perlu adanya program pemetaan spesies-spesies  $\square$ pecime.
- Perlu ada data base flora-fauna dari setiap areal hutan yang direncanakan akan dikonversi untuk pembangunan infrastruktur (dokumentasi berupa  $\square$ pecimen tumbuhan dan hewan yang disimpan pada institusi ilmu pengetahuan/LIPI atau Universitas) untuk kepentingan ilmu pengetahuan bagi generasi mendatang.
- Kajian ratio persentase luas hutan yang dibuka dan yang dibiarkan tetap utuh.
- Kajian ekonomi evaluasi sumber daya hutan untuk memberikan gambaran tentang keuntungan dan atau kerugian yang berkaitan dengan berbagai pilihan dan program pengelolaan sumber daya alam.

## **BAB VII**

### **PESISIR DAN LAUT**

Kabupaten Sorong memiliki sumber daya alam laut yang sangat potensial dari keanekaragaman jenis mulai dari hasil satwa laut, tumbuhan laut sampai ekosistem yang lengkap.

Berbagai potensi sumber daya alam laut tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat secara terus menerus guna memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari dan juga untuk tujuan komersial yang dimulai dengan cara tradisional sampai dengan cara modern. Sumber daya alam laut yang ada di perairan Sorong seperti penyu, ketam kelapa, tumbuhan laut, terumbu karang, berbagai jenis ikan baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi undang – undang.

Dalam memanfaatkan sumber daya alam laut tersebut, kadang-kadang masyarakat kurang memperhatikan aspek kelestariannya, dan apabila hal ini dibiarkan terus – menerus dalam waktu yang lama dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan populasi di habitat alam, bahkan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kepunahan dari jenis-jenis sumber daya alam laut yang ada. Pemanfaatan sumber daya alam laut yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan perlindungan serta konservasi antara lain :

1. Penangkapan ikan dengan bahan peledak dan racun;
2. Penangkapan ikan yang berlebihan;
3. Polusi penebangan hutan sekitar pantai;
4. Pemanfaatan satwa laut dan biota laut yang dilindungi undang-undang;
5. Pemanfaatan terumbu karang.

#### **Perikanan dan Kelautan**

Berdasarkan pada potensi SDA yang dimiliki serta semakin banyaknya permintaan akan produk perikanan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran akan arti pentingnya gizi ikan sebagai sumber protein hewani sehingga sektor perikanan dan kelautan tetap dapat menjadi salah satu roda penggerak utama perekonomian daerah.

Sektor perikanan dan kelautan Kabupaten Sorong berpotensi untuk dikembangkan karena didukung dengan potensi lahan (wilayah laut) untuk usaha penangkapan dengan bermacam jenis hasil laut dan lahan budi daya baik perikanan laut maupun perikanan air tawar. Adapun komoditi perikanan tangkap antara lain : ikan dasar, (ikan kakap, ikan ekor kuning) ikan pelagis (tuna, cakalang, kembung, teri, udang dan lain-lain). Komoditi lainnya seperti moluska/kerang-kerangan, rumput laut, dan penyu belimbing, serta terumbu karang sebagai salah satu aset pariwisata yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang.

### **Permasalahan**

1. Rendahnya kualitas nelayan, pembudidaya ikan, serta petugas teknis dalam pengelolaan sumber daya perikanan baik tangkap maupun budi daya
2. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung produksi perikanan
3. Lemahnya akses permodalan nelayan/pembudidaya ikan untuk mengembangkan usahanya
4. Belum adanya data potensi perikanan yang akurat di masing-masing distrik
5. Terbatasnya dana pembinaan kepada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan
6. Lemahnya pengawasan sumber daya perairan

### **Sasaran**

Sasaran akhir dari revitalisasi pada sektor perikanan dan kelautan rata-rata 4,5 persen per tahun dalam periode 2006–2010 terutama dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia nelayan serta pembudidaya ikan dan produksi perikanan.

Adapun sasaran umum yang akan dicapai antara lain :

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan nelayan, pembudidaya ikan, dan petugas teknis dalam mengelola sumber daya perikanan
2. Meningkatnya produksi perikanan sejalan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
3. Meningkatnya kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok nelayan/pembudidaya ikan
4. Tersedianya data potensi perikanan yang akurat pada tiap-tiap distrik.
5. Meningkatnya frekwensi pengawasan sumber daya perairan

## **Arah Kebijakan**

Dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi dan beberapa sasaran di atas, maka arah kebijakan yang akan dicapai antara lain :

1. Peningkatan kualitas SDM nelayan/pembudidaya ikan melalui jalur non formal
2. Peningkatan kualitas petugas teknis (PNS) melalui pendidikan teknis dan non teknis dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan
3. Peningkatan bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan/pembudidaya ikan dalam menopang produksi perikanan
4. Peningkatan produksi perikanan dengan sistem agribisnis melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan
5. Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam kegiatan penelitian
6. Peningkatan pengawasan sumber daya perairan

## **Program dan Kegiatan**

1. Program Pembangunan SDM nelayan dan petani ikan, pegawai Dinas Perikanan yang mandiri dan terampil, akan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain ; Penlat Lapang, magang bagi Nelayan dan petani ikan , Mengikutsertakan pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi , yang diadakan oleh DKP, dan tugas belajar , Pemantauan dan analisa hasil kegiatan.
2. Program Pembangunan sarana dan prasarana perikanan dalam rangka peningkatan produksi, kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya ; (1) Pembangunan kawasan industri (PPI, TPI, Pabrik Es, dan cold strage dan mini plan , (2) Pengadaan armadadan alat Penangkapan ikan , rumpon, (3) Pengadaan sarana dan prasarana budidaya ( laut, darat ), (4) Penguatan modal nelayan dan pembudidayaan ikan, (5) Pengkajian dan pemilihan area konservasi sebagai daerah bank ikan.

2. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain ; Pengadaan Speed Boat pengawasan, Patroli laut dengan instansi terkait, Pembentukan dan pembinaan POKWAKMAS.

## **BAB VIII**

### **AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **A. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sorong**

Untuk mencegah terjadinya pemusatan pertumbuhan yang dapat mengacu Biodiversity dan kelestarian lingkungan di kabupaten sorong, terutama adanya Industri Migas, HPH dan Perkebunan kelapa sawit, maka diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam menjawab dampak Sosial, Ekonomi, Budaya maupun dampak Lingkungan melalui 3 ( tiga ) akses yaitu :

- Akses partisipasi ( keikutsertaan ) dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan wilayah termasuk sinergi antara pemerintah adat dan pemerintah propinsi dan lokal.
- Akses Informasi berupa informasi publik untuk memahami resiko dan manfaat adanya aktivitas pembangunan serta berperan untuk proses pengambilan keputusan.
- Akses keadilan berupa mendapat kesamaan perlakuan hukum terhadap berbagai kasus yang timbul akibat dampak investasi Skala besar yang disesuaikan dengan norma – norma adat yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan norma- norma secara hukum.

Kenyataan menunjukkan bahwa Isu – isu Strategis pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Sorong masih saja ada dan semakin berkembang dan pada gilirannya dapat berpotensi mengancam dan menekan keberadaan sumber daya alam dan lingkungan. Langkah awal telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten sorong dengan mulai membentuk Institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan. hal ini dimaksudkan agar melalui tugas pokok dan fungsi lembaga ini dapat memegang peran dalam pengendalian dampak lingkungan.

Sejalan dengan itu pemerintah Kabupaten Sorong mengambil inisiatif untuk memberikan masukan berupa penyusunan kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kabupaten sorong terdiri dari :

- Pemberdayaan masyarakat adat dan institusi ekonomi rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- Pengembangan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Peningkatan kualitas pengawasan, penataan dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Peningkatan kualitas pengendalian, pemanfaatan, dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

**B. Program, Sasaran dan Indikator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan**

Berdasarkan 5 ( lima ) kebijaksanaan tersebut maka penyusunan program-program diarahkan kepada 7 (tujuh) program utama :

- Program peningkatan ketertiban dan peran serta masyarakat adat serta advokasi perlindungan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Program pencegahan dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Program konservasi, preservasi serta rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Program pengembangan sistem informasi lingkungan dan sumber daya alam.
- Program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
- Program kerjasama pengelolaan lingkungan hidup antar daerah.
- Program peningkatan kapasitas analisis mengenai dampak lingkungan.

Adapun penjabaran dan masing-masing program adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Ketertiban dan Peran Serta Masyarakat Adat Serta Advokasi Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat adat di Kabupaten Sorong melalui institusi ekonomi berbaris masyarakat dan kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sekaligus memberikan advokasi kepentingan masyarakat adat dan perlindungan terhadap permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga kepentingan masyarakat adat dan masyarakat banyak dapat diselamatkan serta hak-hak masyarakat dapat terpenuhi.

Pada saat hak-hak ini sudah diberikan sesuai dengan proporsinya, maka kewajiban masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup harus mengiring di dalamnya dalam rangka terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih sinergis. Upaya advokasi yang dilaksanakan dimulai pada tingkat yang terendah yaitu penyelesaian permasalahan dengan jalan musyawarah adapt sampai pada tingkat tinggi yang melalui jalur hukum.

Sasaran program ini adalah meningkatnya ketertiban dan peran serta masyarakat adat di Kabupaten Sorong dalam pengelolaan lingkungan hidup. Serta tersusunnya mekanisme advokasi dan kelembagaan yang akan menanganinya. Adanya kelembagaan advokasi ini sangat penting sekali untuk menerima semua pengaduan masyarakat yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator keberhasilan program : Apabila dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masyarakat adat terlibat penuh dalam proses pengambilan keputusan secara proporsional. Meningkatnya pembinaan terhadap ekonomi lokal masyarakat pesisir, laut dan daerah penyangga. Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Meningkatnya kapasitas masyarakat lokal ( adat ) dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Meningkatnya kerjasama kemitraan dengan semua stackholders. Pengakuan terhadap hak adat dan ulayat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Meningkatnya pemasyarakatan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Meningkatnya pemanfaatan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Serta meningkatnya kepatuhan dunia usaha dan masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan dan sistem tata nilai masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan.

- Program kerjasama pengelolaan Lingkungan hidup antar daerah

Program ini bertujuan menyelaraskan keberadaan dan pelaksanaan peraturan - peraturan antar daerah dibidang pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup, khususnya bagi daerah yang akan melaksanakan kerja sama agar tidak terjadi tumpang tindih, kontradiktif maupun perbedaan persepsi sehingga membuka peluang terjadinya kegagalan atau penyalahgunaan peraturan.

Sasaran program ini adalah tersedianya peraturan antar daerah dalam pengelolaan secara terpadu antar daerah ekosistem hutan mangrove, ekosistem perairan, ekosistem pegunungan hutan hujan tropis maupun ekosistem dataran rendah.

Indikator keberhasilan program. Keberhasilan program ini dapat tercapai apabila terdapat komitmen yang tinggi antara pemerintah daerah antara pengelola sumber daya alam dan lingkungan secara terpadu, terdapatnya perangkat hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu antara daerah, adanya kelembagaan dalam pengelolaan secara terpadu antara daerah serta semakin meningkatnya peranserta masyarakat adat dalam proses perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup antar daerah.

- Program pencegahan dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya pencegah perusakan dan atau pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi.

Sasaran program ini adalah terciptanya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Indikator Keberhasilan Program : keberhasilan program ini akan dapat tercapai apabila tercipta standar baku mutu kerusakan lingkungan, serta adanya kepatuhan dari pihak investor maupun pemodal terhadap standar baku mutu kerusakan lingkungan dalam melakukan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Sorong.

- Program Konservasi, Preservasi serta Rehabilitasi Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup

Program ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya hutan, laut dan tambang di Kabupaten Sorong.

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah memanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri. Sasaran lain dari program ini adalah terlindunginya kawasan – kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.

Indikator keberhasilan program : Keberhasilan program ini akan tercapai apabila para investor dan pemodal memperhatikan serta menjalankan arahan – arahan yang telah ditetapkan. Dalam rangka merehabilitasi kerusakan lingkungan maka pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha seara aktif melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang terjadi. Meningkatkan pengelolaan pesisir dan laut.

- Program Pengembangan Sistim Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam.

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi yang lengkap mengenai kondisi stock sumber daya alam maupun sumber daya alam flow serta berbagai potensi ancaman dan tekanan degradasi lingkungan di Kabupaten Sorong, melalui inventarisasi dan evaluasi serta penguatan sistim informasi.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah : Tersedianya data dan informasi serta teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumber daya alam dan lingkungan maupun status lingkungan hidup daerah oleh masyarakat luas di Kabupaten Sorong.

Indikator keberhasilan program : Keberhasilan program ini akan tercapai apabila data dan informasi tentang neraca sumber daya alam serta

status lingkungan hidup di daerah terakses dan dapat digunakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Sorong.

Data dan informasi mengenai potensi maupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat terakses secara efektif. Kinerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari semua aktor yang mengeksploitasi sumber daya alam dapat dievaluasi secara efektif serta tersedianya sarana dan peralatan yang memadai.

- Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata system hukum, perangkat hukum dan kebijakan, mengembangkan kelembagaan serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang efektif dan berkeadilan.

Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

Indikator keberhasilan program : Keberhasilan program ini dapat berhasil apabila semakin meningkatnya terhadap hukum lingkungan, semakin efektifnya jaringan kelembagaan serta meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya kualitas sumber daya manusia pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya efektifitas struktur, kultur, dan fungsi kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, tersedianya peraturan pelaksanaan dan penegakannya serta kuatnya institusi penegak hukum lingkungan, pengakuan maupun masuknya lembaga adat lokal dalam status kepemilikan dan meningkatnya control masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- Program Peningkatan Kapasitas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelembagaan dibidang Amdal serta memberikan pemahaman dan penguatan kepada masyarakat

serta memberikan peluang akses informasi tentang hak dan kewajiban setiap Stakeholder dalam proses – proses implementasi AMDAL.

Sasaran program ini adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, tersedianya akses informasi dan keikutsertaan masyarakat lokal dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Indikator keberhasilan program. Keberhasilan program ini dapat tercapai apabila terdapat kelembagaan di bidang Amdal pada masing – masing daerah, semakin intensifnya pertemuan dibidang Amdal serta semakin efektifnya kinerja komisi penilai Amdal di daerah.

### **C. Rencana Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Kegiatan operasional yang disusun berdasarkan program – program diatas dijabarkan sebagai berikut :

1. Pogram peningkatan ketertiban dan peranserta masyarakat adat serta advoasi perlindungan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, prioritas kegiatan meliputi :
  - Pembinaan kelompok konservasi dalam peningkatan perekonomian dan pendapatan perkapita.
  - Pemberian insentif dan disinsentif bagi masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan.
  - Kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan.
  - Kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan.
  - Kemitraan dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengelolaan lingkungan.
  - Advokasi perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan.
  - Advokasi perlindungan hukum bagi dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan.
  - Pekan hari lingkungan hidup

3. Program pencegahan dan pemilihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, prioritas kegiatan ini meliputi :
  - Penyusunan Baku Mutu Air dan udara.
  - Penyusunan Baku Mutu Limbah Cair dan Udara.
  - Penyusunan Baku Mutu kerusakan Pantai dan Laut.
  - Penyusunan Baku Mutu Limbah B3.
  - Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan.
  - Indikasi kerusakan Sumber air dan Biomassa.
  - Identifikasi kerusakan Kualitas Udara.
  - Identifikasi Kerusakan Lahan dan Hutan.
  - Identifikasi spesies eksotik dan endemik
4. Program Konservasi, Preserpasi serta Rehabilitasi Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup, Prioritas Kegiatan meliputi :
  - Pemantauan Kawasan Konservasi
  - Rehabilitasi Lahan Kritis.
  - Rehabilitasi Kerusakan Kawasan Hutan mangrove.
  - Rehabilitasi Kerusakan Kawasan Hutan sagu.
  - Rehabilitasi Sepadan Pantai, Danau dan Sungai.
  - Pengamanan Sumber – sumber air pada kawasan lindung.
  - Pengamanan sepadan pantai dan sungai.
  - Identifikasi Potensi Sumber Daya Alam.
5. Program Pengembangan Sistim Informasi Lingkungan dan sumber daya alam, Prioritas Kegiatan meliputi :
  - Penyusunan Data Base Lingkungan Hidup ( Laporan Status Lingkungan Hidup ).
  - Pengembangan Sistim Informasi Lingkungan berbasis Sistim Informasi Geografis.
  - Pengembangan jaringan intranet dan internet berbasis data atribut dan tabular.
  - Penyusunan profil dan data base potensi sumber daya alam.
  - Pembentukan jaringan Sistim Informasi Georafis antar Stakeholders.
6. Program penataan Kelembagaan Hukum Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Prioritas meliputi :
  - Pembentukan Forum Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Kursus Pengelolaan Lingkungan, Audit Lingkungan.
  - Kursus PPNS dibidang Lingkungan.
  - Kursus Pengawas Lingkungan Hidup.
  - Kursus Dasar – dasar Amdal A, Penyusun B dan Penilai C.
  - Studi Banding.
7. Program Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup Antar Daerah, Prioritas Kegiatan meliputi :
- Penyusunan Panduan Pengelolaan Lingkungan Antar Sektor.
  - Penyusunan Panduan Pengelolaan Lingkungan Hidup Antar Wilayah.
  - Penyusunan Pedoman tentang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan antar wilayah.
  - Penyusunan Agenda Pembangunan Berwawasan Lingkungan.
8. Program Peningkatan Kapasitas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Prioritas Kegiatan meliputi :
- Pembentan Komisi, Tim Komisi dan Sekretariat Amdal ( Operasional Komisi Amdal).
  - Evaluasi Kinerja Perusahaan.
  - Pemantauan dan Monitoring Kegiatan Wajib Amdal.
  - Sosialisai Peraturan Perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup dan Amdal.
  - Penyusunan Pedoman Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup antar Daerah
  - Penyusunan Pedoman Mekanisme Rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  - Penyusunan Panduan Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Wajib dilengkapi Amdal.
  - Penyusunan Dokumen Prinsip dan Tata Cara Penegakan Hukum Lingkungan melalui Instrumen Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana.
  - Penyusunan Panduan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
  - Penyusunan Panduan tentang Pemantauan RKL dan RPL.

## DAFTAR PUSTAKA

1. KLH, Adipura Liberti, Desember 2005
2. KLH, Majalah : “ Serasi, Selaras, Harmoni ”, Januari 2006
3. KLH, Majalah : “ Serasi, Selaras, Harmoni ”, Februari 2006
4. UNDP, Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua Barat, Manokwari, 2006
5. BAPPEDA Kab. Sorong, RJPMD Kab. Sorong Tahun 2007, Sorong, 2007
6. PT. PERTAMINA (Persero ) UP VII Kasim Sorong, Laporan Pekerjaan : Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I, Sorong, 2007